
ARTICLE

Implementasi Program Bantuan Modal Usaha dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung)

Halfa Nur Faizah¹, Meiliyana², Ani Agus Puspawati³

^{1,2,3}Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

How to cite: Fuaziah, H.N, Meiliyana, M., Puspawati, A.A, (2023). Implementasi Program Bantuan Modal Usaha Dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung). *Administrativa* (5) 1

Article History

Received: 17 Juni 2022

Accepted: 14 April 2023

Keywords:

Implementation, Business Capital Assistance Programme, Family Economic Resilience

ABSTRACT

The high poverty rate in Indonesia is still a problem, coupled with the covid-19 pandemic which has worsened the economy. The covid-19 pandemic caused 66% of MSMEs to experience a decrease in assets and 88% of micro businesses to run out of cash and savings. Even though MSMEs contribute greatly to gross domestic product and employment, this can affect the economic resilience of families in Indonesia. The government has tried to alleviate poverty by creating programmes, but the programme is deemed insufficient so that there needs to be contributions from other parties, one of which is by BAZNAS Bandar Lampung City. Through the Bandar Lampung prosperous and equitable programme, BAZNAS provides capital business loan assistance to MSMEs to improve family economic resilience. This study aims to obtain an overview of the implementation of the business capital assistance programme at BAZNAS Bandar Lampung City and the challenges faced. The type of research used in this study is descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques were interviews, observation, and documentation. The results of the study using implementation analysis according to Adam Smith's theory that the implementation of the business capital assistance program in building family economic resilience related to target groups, organisational implementation and environmental factors has gone quite well, where the assistance distributed has been right on target and has an effect on the economic resilience of beneficiary families on indicators of family income and family financial security. However, the ideal policy is still unclear and the assistance provided is still not running optimally.

Kata Kunci:

Implementasi
Implementasi, Program
Bantuan Modal Usaha,
Ketahanan Ekonomi
Keluarga

ABSTRAK

Tingginya angka kemiskinan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi permasalahan, ditambah dengan adanya pandemi covid-19 yang memperburuk perekonomian. Pandemi covid-19 menyebabkan 66% UMKM mengalami penurunan aset dan 88% usaha mikro kehabisan kas dan tabungan. Padahal UMKM berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja sehingga, hal tersebut dapat mempengaruhi ketahanan ekonomi keluarga di Indonesia. Pemerintah sudah berupaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat

* Corresponding Author

Email : halfanurfaizah659@gmail.com

program-program, namun program tersebut dirasa kurang cukup sehingga perlu adanya kontribusi dari pihak lain, salah satunya oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung. Melalui program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan BAZNAS memberikan bantuan pinjaman usaha modal kepada UMKM guna meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi program bantuan modal usaha pada BAZNAS Kota Bandar Lampung serta tantangan yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menggunakan analisis implementasi menurut teori Adam Smith bahwa implementasi program bantuan modal usaha dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga terkait kelompok sasaran, implementasi organisasi dan faktor lingkungan sudah berjalan cukup baik, dimana bantuan yang disalurkan sudah tepat sasaran dan berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi keluarga penerima bantuan pada indikator pendapatan keluarga dan jaminan keuangan keluarga. Namun kebijakan ideal yang dimiliki masih kurang jelas dan pendampingan yang dilakukan masih belum berjalan secara optimal.

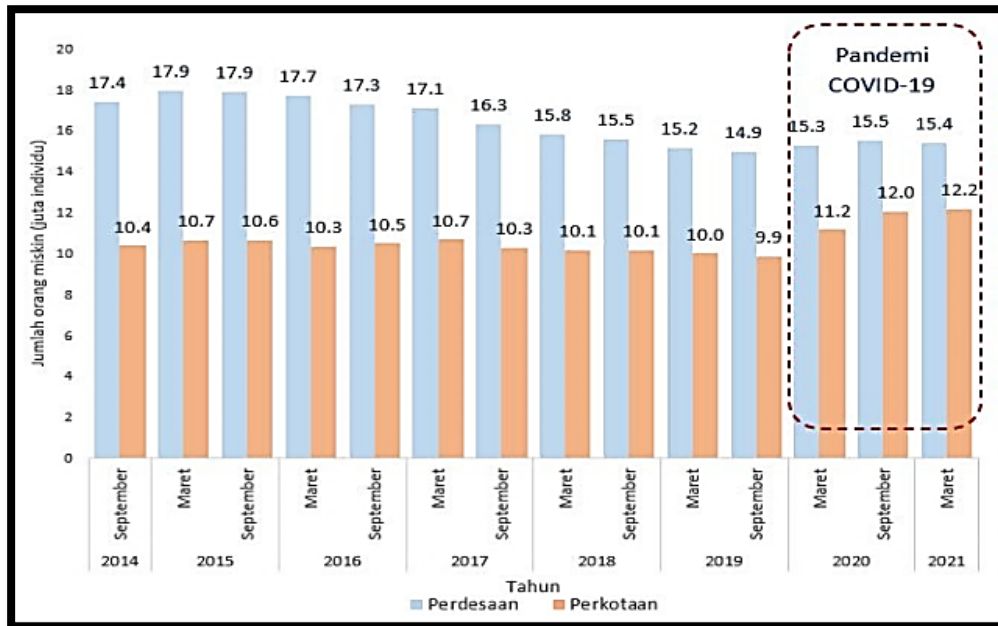
A. PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan dalam sebuah keluarga masih menjadi persoalan bangsa Indonesia yang hingga saat ini sulit untuk diselesaikan. Perkembangan dari masa kemerdekaan hingga sekarang belum juga ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini menurut Redjeki (2014). Menurut Cahyono dan Iryani (dalam Arfiyanti dkk, 2020) kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.

Seiring dengan perkembangan pola kehidupan masyarakat banyak keluarga yang tidak dapat melaksanakan peran dan fungsi keluarga sebagaimana mestinya. Diantaranya dalam memenuhi kebutuhan primer anggota keluarga. Maraknya pengangguran dan rendahnya angka pendapatan mengakibatkan tidak semua keluarga mampu untuk bertahan menghadapi tantangan yang terjadi di kehidupan masyarakat.

Berdasarkan berita resmi statistik nomor 53/07/Th.XXIV dinyatakan bahwa dapat dipastikan bagi keluarga yang miskin memiliki ketahanan ekonomi yang rendah. Data angka kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2021 sesuai berita resmi statistik nomor 53/07/Th.XXIV yang diakses pada 15 Juli, tersebar di Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Papua dan Bali-Nusa Tenggara. Angka kemiskinan tertinggi tersebar di Pulau Jawa dan Sumatra. Di Pulau Sumatra jumlah kemiskinan di daerah perkotaan mencapai 2,32 juta orang dan di daerah pedesaan mencapai angka yang lebih tinggi yaitu 3,74 juta orang. Sedangkan di Pulau Jawa yang tersebar di daerah perkotaan sebesar 6,54 juta dan di pedesaan sebesar 8,21 juta orang.

Ditambah lagi dengan terjadinya wabah pandemi *Covid-19* di tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian dan pendapatan keluarga di Indonesia. Pada masa pandemi *covid-19* jumlah orang miskin di Indonesia meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut gambar grafik peningkatan jumlah angka miskin setelah pandemi *covid-19* menyerang.



Sumber: BPS (2021)

Selain itu, pandemi *Covid-19* juga berdampak pada Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia. Sebanyak 66% rumah tangga yang memiliki usaha kecil mengalami penurunan jumlah pembeli dan omzet usaha. Merujuk pada survei *Asian Development Bank (ADB)* yang diakses pada 9 Agustus 2021 di *website* resmi *ADB's Asian Development* (www.adb.org/outlook), terkait dampak pandemi terhadap UMKM di Indonesia, 88% usaha mikro kehabisan kas atau tabungan dan lebih dari 60% usaha mikro mengurangi tenaga kerjanya. Berikut rincian data jenis usaha dan UMKM yang diolah peneliti berdasarkan data hasil wawancara pada BAZNAS Kota Bandar Lampung (2020).

Dari permasalahan kemiskinan di atas, pemerintah sudah berupaya mengentaskan kemiskinan keluarga di Indonesia melalui beberapa program yang sudah berjalan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program kartu prakerja dan program-program lainnya, namun hal ini dirasa kurang cukup sehingga perlu adanya aktor lain yang menjadi pelengkap dari program-program pemerintah, salah satunya yaitu adanya kontribusi peran zakat, infaq dan sodaqoh yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS adalah satu-satunya badan resmi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 yang bertugas menghimpun dana Zakat, Infaq, dan Sodaqoh (ZIS) dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu tujuan pengelolaan zakat yang dimiliki BAZNAS berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

BAZNAS telah menyalurkan bantuan modal kepada UMKM di seluruh Indonesia, dengan jumlah penyaluran dana sebesar Rp. 27.100.081.223. Dana ini disalurkan untuk masyarakat yang usahanya terdampak *Covid-19*. Selain itu BAZNAS memperluas titik gerai mikro bagi para mitra pengusaha mikro untuk tanggap pandemi *Covid-19* di sejumlah daerah (BAZNAS.go.id, diakses pada 10 Juni 2021).

Hasil prariset mengungkapkan bahwa sejak tahun 2018 BAZNAS Kota Bandar Lampung berperan dalam meningkatkan ketahanan kondisi ekonomi keluarga dengan pemberian bantuan modal usaha kepada pemilik UMKM melalui program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan. Program tersebut tetap berjalan hingga saat ini, meskipun dalam kondisi

pandemi *Covid-19* BAZNAS tetap konsisten dalam menjalankan program tersebut. Program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan diharapkan dapat membangun ketahanan ekonomi keluarga mampu mengurangi angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci menurut Sugiyono (2018). Sejalan dengan pendapat Riehl dalam Nugroho (2009), menyatakan bahwa penelitian kualitatif melibatkan penelitian yang menggunakan metode observasi, komunikasi, dan dokumenter dalam lingkungan alamiah untuk memahami dunia sosial. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari: Kepala pelaksana dan bagian pengumpulan BAZNAS, Donatur BAZNAS, Penerima bantuan Program Bandar Lampung Makmur dan berkeadilan. (pemilik UMKM). Teknik analisis data pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini ialah teknik triangulasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah Nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama, bertugas mengelola zakat secara nasional dengan melakukan Pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dana yang dikelola BAZNAS Kota Bandar Lampung berasal dari zakat, infaq dan sodaqoh (ZIS) yang diberikan oleh masyarakat Kota Bandar Lampung, kemudian akan didistribusikan melalui program-program BAZNAS, salah satunya Program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan. Total perolehan ZIS yang dikelola sebagai berikut:

JENIS	2018	2019	2020
Zakat	646.564.560	702.666.561	758.1067.714
Infaq dan sodaqoh	1.642.626.848	1.732.211.961	1.887.593.648
Total	2.289.191.408	2.434.878.522	2.645.700.362

Sumber: BAZNAS Kota Bandar Lampung, diolah peneliti (2022)

Analisis Implementasi Program Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan

Implementasi kebijakan publik merupakan pelaksanaan atau eksekusi dari suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berupa peraturan perundang-undangan sehingga tujuan dari kebijakan publik itu akan tercapai apabila dilalui dengan tahapan pelaksanaan atau implementasi menurut Rahmawati (2020). Program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan merupakan program berupa pinjaman modal usaha tanpa riba kepada UMKM yang ada di Bandar Lampung. Mereka yang mendapatkan bantuan ini, wajib mengembalikan dengan mengangsur setiap bulannya selama waktu yang disepakati tanpa tambahan jumlah uang (bunga), hal ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM mengembangkan usahanya.

Berdasarkan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Adam Smith (dalam Tachjan, 2006), terdapat empat variabel yang dapat menentukan keberhasilan implementasi program bandar lampung makmur dan berkeadilan, yaitu (1) kebijakan ideal (2) kelompok sasaran (3) implementasi organisasi (4) faktor lingkungan.

Kebijakan ideal Program Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan

Kebijakan ideal pada program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan merujuk pada SOP dan peraturan-peraturan lain yang dibuat oleh BAZNAS yang berkaitan dengan program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan. Kebijakan ideal sendiri menurut Adam Smith (dalam Islamy 2021) diartikan sebagai pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya, dalam hal ini perumus kebijakan adalah BAZNAS Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan data hasil wawancara dengan kepala pelaksana program BAZNAS, proses implementasi kebijakan dalam menjalankan program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan tercantum di dalam SOP dan peraturan-peraturan BAZNAS Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil observasi tidak terdapat kebijakan lain terkait program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan di dalam SOP BAZNAS maupun peraturan-peraturan yang lain, baik mengenai persyaratan penerima bantuan program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan ataupun proses implementasi dari pada program tersebut. Padahal Mazmanian dan Sabatier dalam Suharno (2013) menyatakan bahwa Kejelasan isi kebijakan akan memberi dampak kemudahan dalam diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. Seharusnya program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan memiliki SOP khusus atau peraturan-peraturan lainnya dimana di dalamnya tercantum jelas syarat penerima bantuan UMKM, tahapan implementasi program serta pembinaan dan kontroling yang akan dilakukan BAZNAS dalam menjalankan program ini. Hal ini juga telah dikonfirmasi kepala bagian pelaksana program BAZNAS yang mengatakan bahwa BAZNAS tidak memiliki SOP khusus untuk masing-masing programnya.

Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dalam program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan adalah penerima dari pada bantuan tersebut, dimana mereka adalah sasaran dari implementasi kebijakan itu sendiri, yang diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan menurut Tachjan (2006). (BAZNAS, 2021).

Terdapat 21 UMKM di Bandar Lampung dengan jenis modal usaha yang berbeda-beda mendapatkan pinjaman bantuan modal usaha 5-10 juta. Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima bantuan program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan, mereka sangat terbantu dengan adanya program ini, dimana mereka bisa mengembangkan usahanya melalui pinjaman ini tanpa adanya bunga yang diberikan oleh BAZNAS. Menurut Shahreza dan Lindiawatie (2020) pandemic covid-19 membuat para pelaku UMKM harus membuat strategi baru guna mempertahankan usahanya, salah satunya dengan melakukan pinjaman ini.

wawancara dengan pemilik usaha warung sembako mengatakan setelah mendapat bantuan pinjaman modal tersebut mengalami kenaikan omset, omset yang diperoleh setelah menerima bantuan kurang lebih 6-9 juta (pendapatan kotor) setiap bulannya. Masing-masing penerima bantuan program mengalami kenaikan pendapatan yang kemudian juga berpengaruh pada tabungan keluarga, dimana dengan omset yang semakin tinggi keluarga dapat menabung lebih banyak. Artinya dengan bantuan ini penerima program mengalami peningkatan ketahanan ekonomi keluarga pada variabel pendapatan keluarga dan jaminan keuangan keluarga, hal ini sejalan dengan yang disampaikan cahyaningtyas (2016), bahwasannya variabel ketahanan ekonomi keluarga mencakup pendapatan keluarga dan jaminan keuangan keluarga. Hasil wawancara ini diperkuat dengan bukti rekening tabungan penerima bantuan program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan.

Implementasi Organisasi

1. Sosialisasi Program Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan

BAZNAS kota Bandar Lampung melaksanakan agenda sosialisasi kepada seluruh program yang ada, sosialisasi dilakukan secara langsung dengan membuka stand pelayanan di kantor BAZNAS serta pada mall central plaza dan mall kartini. Menurut Assauri (2007), sosialisasi adalah cara terbaik dalam mengenalkan produk kepada masyarakat, dengan sosialisasi masyarakat minimal mengetahui bahwa hal tersebut itu ada. Dalam hal ini sosialisasi merupakan cara BAZNAS kota Bandar Lampung dalam mengenalkan program Bandar Lampung Makmur dan berkeadilan kepada masyarakat Bandar Lampung. Selain itu BAZNAS menggunakan media sosial seperti whatsapp grup, website dan Instagram guna menyebarkan informasi terkait program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan secara online.

Hasil wawancara dengan penerima bantuan program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan menyatakan bahwa sebagian besar mereka mengetahui informasi terkait program tersebut dari tetangga, kerabat dan dari mulut ke mulut. Sehingga untuk program ini sosialisasi secara langsung dirasa lebih efektif ketimbang melalui social media.

2. Pendistribusian program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan

Calon penerima mengajukan surat permohonan pengajuan dana yang telah disediakan oleh BAZNAS. Berdasarkan wawancara dengan ketua pelaksana program mengatakan bahwa Setelah pengajuan tersebut, BAZNAS melakukan verifikasi berkas dan verifikasi faktual yaitu turun lapang secara langsung, hasil dari pada proses tersebut kemudian di rapatkan dalam pleno keputusan permohonan yang diajukan oleh ketua wakil II. Selanjutnya proses realisasi program dimana seluruh masyarakat yang diterima dalam penajuan permohonan program bandar Lampung makmur dan berkeadilan di kumpulkan di kantor BAZNAS untuk melakukan penyerahan dana sekaligus publikasi.

3. Pembinaan dan Monitoring

Dalam perjalanan realisasi program seharusnya terdapat pembinaan dan mentoring yang dilakukan, menurut Mathis (2022) pembinaan diperlukan sebagai upaya organisasi untuk memberikan pemahaman kepada karyawan mengenai tujuan bersama. Namun berdasarkan wawancara peneliti kepada kepala pelaksana program BAZNAS, sampai saat ini belum adanya pembinaan atau mentoring yang dilakukan BAZNAS kepada penerima program, dikarenakan kurangnya SDM yang ada di BAZNAS, hal ini sejalan dengan pernyataan penerima bantuan program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan bahwa setelah pemberian program tersebut tidak adanya pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS.

Padahal pembinaan adalah hal yang penting dalam upaya pengembangan usaha, dimana seharusnya BAZNAS dapat memberikan pelatihan pengembangan usaha atau memberikan pelatihan manajemen keuangan agar tujuan dari pada zakat produktif dapat terimplementasikan dengan baik. Hal ini seperti yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin yang memberikan bantuan usaha sekaligus memberikan pembinaan kepada 50 UMKM di Kota Banjarmasin dengan tujuan meningkatkan keterampilan para penerima bantuan modal usaha agar dapat mengembangkan usaha dengan amanah dan terarah (sumber <https://kalsel.kemenag.go.id/berita/552956/Bantu-Usaha-Kecil-Lebih-Terarah-Dan-Sesuai-Syariah-BAZNAS-Lakukan-Pembinaan-> diakses pada tanggal 18 Mei 2022).

Kepala pelaksana program BAZNAS mengatakan bahwa belum adanya monitoring terkait angsuran yang dibayarkan oleh penerima bantuan program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan, hal ini diperkuat dengan tidak adanya data angsuran pembayaran dan data perkembangan kondisi UMKM secara keseluruhan saat ini. Penerima bantuan program juga mengatakan bahwa selama ini tidak ada pengecekan ataupun kontroling yang dilakukan pihak BAZNAS kepada mereka. Hal ini sangatlah disayangkan karena implementasi hanya sekedar

menjalankan program, bukan pada fokus tujuan dari pada program tersebut. Padahal menurut sudarsono (dalam Wahab 2012) tujuan implementasi adalah untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan, sedangkan fokus dari pada pemberian bantuan modal ini adalah agar UMKM yang dibantu dapat mengembangkan usahanya.

Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Implementasi Program

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan, dimana pada kondisi covid-19 ketahanan ekonomi keluarga mengalami penurunan, seperti yang dikatakan Shahreza dan Lindiawatie (2020) ketahanan ekonomi keluarga pada masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan khususnya dari sisi pendapatan dan kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga. UMKM yang menjadi salah satu sumber pendapatan juga terdampak, sehingga membutuhkan suntikan modal untuk dapat mempertahankan usahanya. Sehingga dengan kondisi seperti ini, lebih banyak masyarakat yang antusias akan adanya program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan.

2. Lingkungan Politik.

Lingkungan politik menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan. menurut Parisi (2017) dukungan pilotik sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah program kebijakan, dimana pemerintah dapat memberikan alternatif pemecahan masalah-masalah yang dihadapi organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala program BAZNAS, pemerintah daerah telah berkoordinasi dalam hal penyaluran dana zakat kepada lembaga BAZNAS Kota Bandar Lampung, hal ini tentunya menjadi dukungan finansial untuk BAZNAS Kota Bandar Lampung. Selain itu Gubernur Lampung turut mendukung program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan dan akan membantu program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan yang akan mendatang.

D. KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan berpengaruh kepada ketahanan ekonomi keluarga penerima bantuan program pada variable variabel pendapatan keluarga dan variabel jaminan keuangan keluarga. Adapun kesimpulan yang dapat disampaikan jika dilihat dari implementasi program berdasarkan teori Adam Smith.

program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan tidak memiliki SOP atau peraturan-peraturan lainnya dalam menjalankan programnya, kelompok sasaran program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan mengalami peningkatan ketahanan ekonomi keluarga pada variable pendapatan keluarga serta jaminan keuangan keluarga. Program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan diimplementasikan dengan tiga tahap yaitu sosialisasi, pendistribusian, pembinaan dan kontroling kepada penerima program. sosialisasi secara langsung dirasa lebih efisien, sedangkan pembinaan belum berjalan karena kurangnya SDM yang ada di BAZNAS, selain itu BAZNAS Kota Bandar Lampung juga tidak melakukan kontroling. Factor lingkungan program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan adalah lingkungan ekonomi, sosial dan lingkungan politik. Faktor ekonomi dan sosial dipengaruhi karena adanya pandemi Covid-19, faktor politik juga sangat mendominasi karena adanya peran penting kepala daerah yang mendukung program

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah:

1. BAZNAS Kota Bandar Lampung sebaiknya membuat SOP atau peraturan lebih lanjut sebagai acuan dalam menjalankan program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan, karena SOP yang ada masih umum.
2. Sebaiknya BAZNAS memberikan pembinaan berkala kepada para penerima bantuan seperti pemberian pelatihan peningkatan omset, digital marketing dll.
3. Selanjutnya BAZNAS Kota Bandar Lampung melakukan kontroling rutin kepada penerima program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan dan memberikan treatment khusus bagi yang terkendala dalam melakukan penyetoran sehingga terjadi keterlambatan.

REFERENSI

- Arfiyanti, dkk (2020). *Family Development Session Sebagai Upaya Peningkatan Keterampilan Hidup Masyarakat Miskin*. 9(1), 58
- Al-Parisi, S. 2017. Tingkat Efisiensi dan Produktivitas Lembaga Zakat di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 7(1), 63-72.
- BAZNAS.go.id. diakses pada tanggal 10 Juni 2021 Pukul 22:23.
- Berita Resmi Statistik Nomor 53/07/Th.XXIV, diakses pada 15 Juli 2021 tentang Data Persebaran Angka Kemiskinan Di Indonesia.
- Cahyaningtyas, A. Tenrisana, A. A. Dan Triana, D. 2016. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. CV Lintas Katulistiwa. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- IZI to smart. 2018. *Inisiatif Zakat Indonesia*. diakses pada tanggal 18 Mei 2022. <https://izi.or.id/izi-to-smart/>
- Sarfiah, Atmaja dan Vrawati. 2019. Umkm Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa (The Pillar for Economy). *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*. Universitas Tidar
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfa Beta.
- Surat Edaran WaliKota Bandar Lampung Nomor 451.13/712A/I.08/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Gerakan Sadar Zakat.
- Syahreza, Dhona dan Lindiawatie. 2020. Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Depok Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal Of Applied Business an Economic (JABE)*. Vol 7, No 2 (2020).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat